

Collaborative Governance: Trust Building Indicator Dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Mendatte Park Di Kabupaten Enrekang

Collaborative Governance: Trust Building Indicator in Managing Mendatte Park Natural Tourism Object in Enrekang Regency

Muhammad Hidayat Djabbari Hidayat, Khairil Amran, Dewi Sulfa Saguni

Universitas Sembilanbelas November Kolaka
Jl. Pemuda, Taho, Kabupaten Kolaka

Universitas Hasanuddin
Jl. Perintis Kemerdekaan No. KM.10, Tamalanrea, Makassar
Email: yytlmc@gmail.com

Naskah diterima tanggal 4 Oktober 2023. Naskah direvisi tanggal 11 November 2023.
Naskah disetujui tanggal 1 Desember 2023.

Abstrak

Membangun kepercayaan dalam proses kolaborasi pengembangan potensi pariwisata merupakan langkah penting dalam menjaga keseimbangan antara memanfaatkan daya tarik pariwisata dan pemeliharaan daya tarik pariwisata yang berkelanjutan dengan memastikan bahwa proses kolaborasi antar entitas yang terlibat merasa aman dan nyaman didalam proses kolaborasi. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis menganalisis trust building indicator dalam proses kolaborasi untuk pengembangan objek wisata alam Mendatte Park. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang dianalisis secara deskriptif berdasarkan data yang diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data melalui proses wawancara, observasi dilapangan, dan melihat dokumen-dokumen. Adapun data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan beberapa tahapan, yakni: data reduction, data display dan conclusion drawing/verification. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, Adapun informan dalam penelitian ini adalah 1) Dinas Pariwisata Kabupaten Enrekang; 2) Kepala Desa Mendatte; 3) Pengelola (BUMDes Makinawa Mendatte); 3) Penyedia jasa penginapan dan rumah makan (Villa Bambapuang); dan 4) Pengunjung objek wisata alam Mendatte Park. Hasil penelitian menunjukkan proses collaborative governance dengan menggunakan indikator trust building (membangun kepercayaan) di objek wisata alam Mendatte Park dilakukan dengan membangun proses komunikasi formal dan informal yang yang mengedepankan hubungan yang setara serta saling menghargai antar stakeholder. Proses membangun kepercayaan antar stakeholder dipengaruhi oleh beberapa indikator, yakni proses komunikasi, komitmen antar stakeholder, visi bersama, dan dampak yang dihasilkan dari proses kerjasama.

Keywords: *Collaborative Governance*; Kepercayaan; Pariwisata; Mendatte Park

Abstract

Building trust in the collaborative process of developing the potential of tourism is a crucial step in maintaining a balance between leveraging tourism attractions and preserving sustainable tourism attractions. This is achieved by ensuring that the collaboration process among involved entities feels secure and comfortable. The research objective is to analyze trust-building indicators in the collaboration process for the development of the natural tourist attraction Mendatte Park. The research method employs a qualitative approach analyzed descriptively based on data obtained through data collection techniques such as interviews, field observations, and document analysis. The collected data is then analyzed through several stages, namely: data reduction, data display, and conclusion drawing and verification. The informant selection technique uses purposive sampling, with informants including 1) the Tourism Office of Enrekang Regency; 2) the Head of Mendatte Village; 3) the Manager (BUMDes Makinawa Mendatte); 3) accommodation and restaurant service providers (Villa Bambapuang); and 4) visitors to Mendatte Park's natural tourist attraction. The results of the research indicate that the collaborative governance process, using trust-building indicators, in Mendatte Park's natural tourist attraction involves establishing formal and informal communication processes that prioritize equal relationships and mutual respect among stakeholders. The trust-building process among stakeholders is influenced by several indicators, including communication processes, commitment among stakeholders, shared vision, and the impacts resulting from the collaboration process.

Keywords: *Collaborative Governance; Trust; Tourism; Mendatte Park*

PENDAHULUAN

Industri pariwisata telah menjadi salah satu sektor ekonomi yang penting dan berkembang pesat di berbagai negara. Pengelolaan dan pemeliharaan objek wisata, seperti taman nasional, pantai, situs bersejarah, dan destinasi wisata lainnya, semakin kompleks dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan seperti pemerintah, komunitas lokal, sektor swasta, dan organisasi profit lainnya. Namun, pengelolaan dan pemeliharaan objek wisata juga memiliki tantangan dan masalah yang sangat kompleks, termasuk dampak lingkungan yang merusak, konflik antara pemangku kepentingan, pemerasan sumber daya, dan berbagai isu sosial ekonomi politik.

Pada saat yang sama, harapan wisatawan terus berkembang, dengan penekanan pada keberlanjutan, tanggung jawab sosial, dan pengalaman wisata yang berkualitas. Untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan bahwa objek wisata tetap berkelanjutan serta pengelolaan dan pemeliharaan objek wisata yang efektif dan efisien, memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan dalam pengelolaan objek wisata dengan berbasis pada kolaborasi atau bisa di sebut sebagai *collaborative governance*.

Menurut Ansell & Gash (2007), *Collaborative governance* merupakan suatu bentuk pengaturan dimana satu atau lebih badan publik secara langsung melibatkan aktor non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan mencapai konsensus melalui pendekatan deliberatif. Fokus utamanya adalah untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan, program, atau aset publik. Definisi ini diperluas oleh [Emerson & Nabatchi \(2015\)](#) yang menekankan bahwa kolaborasi tidak hanya melibatkan pemerintah sebagai aktor utama, tetapi juga berbagai pihak lainnya, dengan tujuan bersama menyelesaikan beragam permasalahan publik.

Pada *collaborative governance* dalam konteks sektor pariwisata, hal ini menjelaskan bahwa proses kolaborasi mengacu pada keterlibatan aktif dan kerjasama erat antara berbagai pemangku kepentingan yang terlibat. Kolaborasi memberikan kesempatan untuk mengatasi tantangan bersama dan mengoptimalkan manfaat yang dapat diperoleh dari sektor pariwisata. Selain itu, melalui kolaborasi, mereka dapat bersama-sama merancang strategi, membuat keputusan bersama, dan melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga keberlanjutan objek wisata serta memaksimalkan potensi pariwisata yang tersedia.

Salah satu usaha yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Enrekang untuk pengelolaan atau pengembangan objek wisata dengan konsep *collaborative governance* selain dari program-program pariwisata yang telah dilakukan adalah dengan membuat regulasi. Salah satu regulasi yang dilahirkan adalah Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Enrekang Nomor 08 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2017-2028. Pada perda tersebut, membahas terkait stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata, serta pada sapek tujuan pembangunan pariwisata daerah disebutkan bahwa tujuan pembangunan pariwisata adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, komunitas lokal dan pelibatan pihak swasta.

Untuk menjalankan proses *collaborative governance* menurut Ansell & Gash (2007) ada beberapa *indicator* dalam proses kolaborasi, yakni: 1) *Face-to-Face Dialogue*; 2) *Trust Building*; 3) *Commitment to the Process*; 4) *Shared Understanding*; dan 5) *Intermediate Outcomes*. Pada penelitian ini memfokuskan pada *indicator trust building* untuk melihat bagaimana membangun kepercayaan didalam pengelolaan pariwisata. Kemudian, Ansell & Gash (2007) juga mengartikan konsep *trust building* dalam konteks kolaborasi antar organisasi atau kerjasama lintas batas sebagai usaha untuk meningkatkan tingkat

kepercayaan di antara berbagai pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut. Tingkat kepercayaan ini bisa bersifat hubungan antarindividu (interpersonal), antarorganisasi (organizational), atau bahkan antara masyarakat dan pemerintah.

Dalam konteks proses kolaborasi, pembangunan kepercayaan tidak terbatas pada mencapai kesepakatan antara para pemangku kepentingan atau negosiasi antara berbagai aktor. Sebaliknya, proses kolaborasi juga berarti berusaha untuk saling membentuk tingkat kepercayaan yang diperlukan satu sama lain. Penting untuk memulai pembentukan kepercayaan sejak awal dalam proses kolaborasi ini. Hal ini bertujuan untuk menghindari potensi egosentrisme atau ketidakpercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, dalam upaya membangun kepercayaan, kehadiran pemimpin yang menyadari pentingnya kolaborasi menjadi sangat krusial ([Ansell & Gash, 2007](#)).

Membangun kepercayaan dalam proses kolaborasi menjadi langkah yang sangat penting untuk pengembangan pariwisata. Ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan daya tarik pariwisata dan pelestarian daya tarik pariwisata yang berkelanjutan. Kepercayaan ini juga penting untuk memastikan bahwa proses kolaborasi antara berbagai entitas yang terlibat berjalan dengan lancar, di mana mereka merasa aman dan nyaman dalam bertransformasi serta berbagi informasi dan kepentingan. Lebih lanjut, trust building ini dapat menciptakan pengelolaan yang efektif, yang tidak hanya bertujuan untuk memaksimalkan potensi pariwisata, tetapi juga dapat memberikan dampak positif pada aspek ekonomi dan sosial, yang dapat dirasakan oleh masyarakat setempat.

Pada kenyataannya, potensi pariwisata disetiap daerah atau wilayah sangat beragam dan memiliki keunikannya tersendiri yang harus dikelola dengan efektif. Mengelola sumber daya pariwisata tersebut dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah dan ekonomi masyarakat setempat di destinasi pariwisata tersebut ([Djabbari, 2023](#)). Salah satu potensi wisata dan daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Enrekang adalah keindahan landscape alam pegunungan yang terbentang yang dipenuhi oleh gunung-gunung karst. Selain itu, kabupaten Enrekang juga merupakan wilayah strategis, yang merupakan daerah persinggahan bagi wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Tana Toraja. Sehingga ini menjadi salah satu hal yang dapat dimanfaatkan untuk menarik wisatawan berkunjung di Kabupaten Enrekang. Beberapa destinasi wisata di Kabupaten Enrekang yang dapat dikunjungi, antara lain: Resting House, Buttu Macca, Buntu Sumbang, Dante Pine, dan yang terbaru yaitu wisata alam Mendatte Park. Objek wisata alam Mendatte Park ini adalah

destinasi wisata buatan yang menghadirkan nuansa wisata alam dengan landscape gunung karst dan Buttu Kabobong.

Objek wisata alam Mendatte Park terletak di Desa Bambapuang, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, objek wisata ini diapit oleh gugusan pegunungan karst yakni deretan tebing bambapuang di sebelah barat, dan deretan Gunung Nona (Buttu Kabobong) di sebelah timur. Di objek wisata alam Mendatte Park ini terdapat banyak aktivitas menarik seperti taman rekreasi camping, hiking, wisata ternak, wisata pertanian dan spot-spot foto yang instagramable. Objek wisata alam Mendatte Park ini di kelolah melalui Bumdes atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes Makinawa Mendatte). Untuk jumlah kunjungan objek wisata alam Mendatte Park di tahun 2021 mencapai kurang lebih 3000 pengunjung dengan pendapatan kurang lebih Rp. 14.597.000. Hal tersebut memperlihatkan bahwa BUMDes sangat berperan didalam pengembangan pariwisata atau pengelolaan asset/potensi desa.

Di Kabupaten Enrekang, sebagian besar destinasi pariwisata dikelola atau dimiliki oleh sektor swasta/Bumdes/Komunitas sadar wisata, dan keterlibatan pemerintah dalam kepemilikan objek wisata masih terbatas. Selain itu, pemerintah Kabupaten Enrekang belum sepenuhnya mengoptimalkan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan asli daerah. Ini terlihat dari beberapa objek wisata yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang belum dikelola dengan baik dan maksimal. Hasil penelitian oleh [Djabbari et al. \(2021\)](#) menunjukkan bahwa kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah dalam pengelolaan pariwisata memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas dalam pengumpulan retribusi pariwisata, sekaligus memungkinkan pengelolaan pariwisata yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung dan mengalokasikan anggaran dengan efisien dalam proyek pembangunan pariwisata.

Masalah lain pengembangan objek wisata di Kabupaten Enrekang adalah proses kolaborasi antara pemerintah daerah dan para pemilik atau pengelola objek wisata dengan mengatur secara detail pembagian hak dan kewajiban didalam kerjasama termasuk didalam menarik retribusi dengan membuat Memorandum of Understanding (MoU) belum sepenuhnya dilakukan. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti menemukan berbagai kendala dalam proses pengelolaan objek wisata alam Mendatte Park yang melibatkan pemerintah dan pengelola objek wisata alam Mendatte Park. Hal ini disebabkan karena perjanjian kerjasama yang dilakukan pemerintah daerah dan pengelola

objek wisata alam Mendatte Park belum mengatur secara detail pelibatan masyarakat dalam mengelola objek wisata secara bersama.

Melalui proses kolaborasi kekurangan atau kelemahan yang ada dalam pemerintah dapat diminimalisir atau diatasi. Seperti yang disoroti oleh [Akbar et al. \(2022\)](#), bahwa perkembangan sektor pariwisata bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi sektor swasta dan masyarakat. Ini mencerminkan bentuk kolaborasi di mana salah satu tujuannya adalah untuk mengatasi keterbatasan kapasitas pemerintah dalam mengelola sektor pariwisata. Oleh karena itu, dalam kerjasama atau collaborative governance, para pemangku kebijakan dapat memberikan kontribusi yang konstruktif dengan memanfaatkan kelebihan dan mengatasi kekurangan dalam implementasi kebijakan atau program. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk membangun kerjasama yang baik antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat setempat di sekitar objek wisata tersebut agar dapat memajukan objek wisata tersebut ke depannya.

Berdasarkan hasil analisis dari beberapa literatur diatas, maka penelitian ini mengambil peran untuk menganalisis proses collaborative governance pada aspek membangun kepercayaan dalam proses kolaborasi. Artinya, pada artikel ini akan membahas terkait aspek kepercayaan dalam pengelollan pariwisata yang kolaboratif di objek wisata alam mendatte park. Dengan demikian, tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis trust building indicator dalam proses kolaborasi untuk pengembangan objek wisata alam Mendatte Park.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Collaborative Governance

Konsep *collaborative goveranance* adalah suatu konsep kerjasama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat lokal, dan organisasi non-pemerintah, yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Collaborative governance bertujuan untuk mengatasi masalah atau isu publik dengan melibatkan berbagai pihak yang bekerja sama, tidak hanya terbatas pada instansi pemerintah, tetapi juga dapat melibatkan entitas non-pemerintah. Sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, masyarakat seharusnya aktif terlibat dalam proses perumusan dan pengambilan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan publik. Kerja sama ini dilakukan karena terdapat keterbatasan dalam kapasitas, sumber daya, dan jaringan yang

dimiliki oleh setiap pihak yang terlibat. Oleh karena itu, kolaborasi dapat menggabungkan dan melengkapi berbagai elemen yang mendukung keberhasilan pencapaian tujuan bersama. Untuk menyelesaikan masalah-masalah publik ini, diperlukan usaha bersama sebagai pendekatan yang dianjurkan.

Menurut O'Leary, seperti yang dipaparkan dalam [Aeni & Astuti \(2019\)](#), ada setidaknya enam alasan utama mengapa *collaborative governance* dianggap sebagai pilihan terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan: 1) Kompleksitas Masalah Publik; 2) Outsourcing dan Kerja Sama; 3) Perubahan Hubungan Antar Pemerintah; 4) Meningkatkan Efektivitas Program; 5) Perkembangan Teknologi; dan 6) Partisipasi Masyarakat. Dengan demikian, *collaborative governance* menjadi solusi yang tepat dalam menghadapi beragam tantangan kompleks dalam pemerintahan modern, memungkinkan berbagai pihak untuk bekerja sama guna mencapai hasil yang lebih baik dalam penyelesaian masalah-masalah publik. *Collaborative governance* menurut [Emerson et al. \(2012\)](#) adalah proses dan struktur pengambilan keputusan dan manajemen kebijakan publik yang melibatkan berbagai pihak melintasi batasan lembaga-lembaga publik, tingkat pemerintahan, dan/atau ranah publik, swasta, dan sipil untuk melaksanakan tujuan publik yang tidak dapat dicapai sebaliknya.

Keberhasilan *Collaborative Governance*

Menurut [Aeni & Astuti \(2019\)](#), keberhasilan penerapan *collaborative governance* sangat ditentukan oleh: 1) kepemimpinan yang kuat (*strong leadership*), yang memiliki kemampuan untuk mengontrol dan mengatur kegiatan yang kompleks ini; 2) Diperlukan mediator yang bertindak netral/tidak memihak/tidak mewakili kepentingan tertentu agar mekanisme berjalan dengan seimbang sesuai peran dan tanggungjawab masing-masing; 3) Kolaborasi akan berhasil ketika birokrasi ditempatkan sebagai pengelola konsep kolaborasi karena organisasi pemerintah memiliki kewenangan yang jauh lebih besar dibandingkan organisasi lainnya; 4) Negosiasi menjadi tahap penting dalam proses kolaborasi karena ketidakseimbangan kekuasaan ataupun sumberdaya; dan 5) Pengambilan keputusan atas dasar kesepakatan dan saling menghormati-tidak dilahirkan atas dasar otoriter.

De Save dalam [Sudarmo \(2011\)](#) menjelaskan bahwa salah satu ukuran kesuksesan *collaborative governance* adalah adanya saling kepercayaan di antara aktor yang terlibat, yang bersandar pada hubungan profesional atau sosial, serta keyakinan bahwa aktor-aktor tersebut mempercayai informasi dan upaya dari aktor lain dalam suatu jaringan untuk

mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, trust building dalam collaborative governance merujuk pada usaha-usaha untuk membangun kepercayaan antara semua pihak yang terlibat dalam kolaborasi.

Proses pembangunan kepercayaan ini menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak merasa aman dan nyaman dalam berbagi informasi serta berkomunikasi satu sama lain ([Afandi et al., 2023](#); [Ansell & Gash, 2007](#)). Menurut Ansell & Gash (2007), dalam konteks kolaborasi, pembangunan kepercayaan tidak terbatas pada mencapai kesepakatan antara para pemangku kepentingan atau negosiasi antara berbagai aktor. Sebaliknya, proses kolaborasi juga berarti berusaha untuk saling membentuk tingkat kepercayaan yang diperlukan satu sama lain. Penting untuk memulai pembentukan kepercayaan sejak awal dalam proses kolaborasi ini. Hal ini bertujuan untuk menghindari potensi egosentrisme atau ketidakpercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, dalam upaya membangun kepercayaan, kehadiran pemimpin yang menyadari pentingnya kolaborasi menjadi sangat krusial.

Ansell & Gash (2007) mengidentifikasi beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai panduan dalam menjalankan proses kolaborasi, yakni: a) Dialog Tatap Muka: Komunikasi langsung (tatap muka) adalah usaha untuk mengurangi persepsi negatif terhadap pihak lain dan untuk membangun saling pengertian antar aktor kolaborasi; b) Membangun Kepercayaan: Membangun kepercayaan merupakan langkah penting dalam mengembangkan kolaborasi yang efektif. Ini memerlukan waktu yang cukup lama karena membangun kepercayaan melibatkan komunikasi yang terus-menerus dan penyesuaian terhadap kondisi saat ini, termasuk mengatasi konflik masa lalu; c) Komitmen pada Proses Kolaborasi: Komitmen adalah unsur penting dalam kolaborasi dan berkaitan erat dengan motivasi para aktor kolaborasi; d) Pemahaman Bersama: Pemahaman bersama mencakup keselarasan tujuan dan mengurangi potensi kesalahpahaman antar aktor; dan e) Dampak Sementara: Dampak sementara menciptakan umpan balik positif dalam kolaborasi, yang dapat dilihat sebagai "*small-wins*" atau kemenangan kecil yang memberikan dorongan positif kepada para pemangku kepentingan.

Proses kolaboratif yang efektif memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat yang diwakili oleh individu-individu yang memiliki kemampuan untuk berdialog dalam kolaborasi. Dalam konteks ini, kolaborasi yang berhasil melibatkan dialog yang otentik dan berfokus pada pencapaian konsensus. Oleh karena itu, ada beberapa prasyarat yang harus terpenuhi agar proses kolaboratif dapat dianggap terjadi ([Sufianti et al., 2013](#)), yakni: 1)

Partisipasi Para Pemangku Kepentingan (Terdapat keterlibatan aktif dari semua pihak yang memiliki kepentingan terkait dalam proses kolaborasi); 2) Kesetaraan Kekuasaan (Keseimbangan kekuasaan harus ada, yang berarti tidak ada dominasi oleh satu pihak tertentu. Setiap aktor yang berpartisipasi dalam dialog tidak boleh terhalang oleh hirarki atau struktur kekuasaan yang tidak seimbang, dan harus ada rasa saling menghormati antara mereka); dan 3) Aktor yang Kompeten (Aktor-aktor yang terlibat dalam kolaborasi harus memiliki kompetensi yang relevan untuk masalah yang sedang dibahas).

Dengan memenuhi prasyarat-prasyarat ini, proses kolaboratif dapat berlangsung dengan efektif, memungkinkan berbagai pihak untuk bekerja sama dengan cara yang menghasilkan solusi yang lebih baik dan mendukung pencapaian konsensus dalam pemecahan masalah. Maka dari itu, konsep kolaboratif adalah gagasan yang sangat luas, dan untuk menjelaskannya, Emerson dan Nabatch (dalam [Emerson, 2018](#)) mengembangkan konsep tata kelola kolaboratif dengan kerangka kerja integratif. Kerangka kerja ini memungkinkan analisis empiris yang membandingkan dan mengagregat berbagai perspektif teoritis, normatif, dan aplikatif. Dalam kerangka kerja ini, terdapat tiga komponen utama: 1) Konteks sistem dan faktor pendorong; 2) Dinamika kolaborasi; dan 3) Tindakan kolaboratif, hasil, dan adaptasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini yakni pendekatan kualitatif yang dianalisis secara deskriptif. Fokus penelitian ini adalah menganalisis indikator *trust building* pada proses kolaborasi di objek wisata alam Mendatte Park. Data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui proses wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumen. Adapun data yang diperoleh dianalisis melalui beberapa tahapan, yakni: *data reduction*, data display dan *conclusion drawing/verification*. Teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, adapun informan dalam penelitian ini, adalah: 1) Dinas Pariwisata Kabupaten Enrekang; 2) Kepala Desa Mendatte; 3) Pengelola (BUMDes Makinawa Mendatte); 3) Penyedia jasa penginapan dan rumah makan (Villa Bambapuang); dan 4) Pengunjung objek wisata alam Mendatte Park.

HASIL DAN DISKUSI

Trust building atau membangun kepercayaan adalah salah satu tahap dalam proses kolaborasi yang menganggap bahwa kolaborasi tidak hanya tentang negosiasi antara berbagai pemangku kepentingan. Lebih dari itu, ini merupakan upaya untuk saling membangun kepercayaan satu sama lain. Membangun kepercayaan sangat penting dilakukan sesegera mungkin ketika proses kolaborasi dimulai, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya egoisme antara berbagai lembaga atau institusi yang terlibat. Berikut adalah hasil penelitian mengenai *trust building indicator* dalam proses kolaborasi pada objek wisata alam Mendatte Park:

Tabel 1.

Hasil Reduksi Penelitian *Trust Building Indicator* pada pada proses kolaborasi di objek wisata alam Mendatte Park

Indikator	Hasil Reduksi Penelitian		
	Bumdes Makinawa	Pemerintah Desa Mendatte	Dinas Pariwisata Kabupate Enrekang
Trust Building	<ul style="list-style-type: none"> • BUMDes Makinawa saat ini masih focus pada proses pengelolaan Bumdes dan objek wisata • Membangun kesepahaman belum dilakukan secara efektif, karena Bumdes belum menemukan masalah yang perlu untuk diselesaikan atau sejauh ini Bumdes masih berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri 	<ul style="list-style-type: none"> • Stakeholder berkomitmen didalam melakukan pengembangan objek wisata alam Mendatte Park • Komunikasi setara dan saling menghargai sehingga dapat membangun kepercayaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikasi yang terbangun masih didominasi oleh pihak pemerintah • Media komunikasi dilakukan didalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan antara Bumdes, pemerintah desa dan pemerintah kabupaten

Sumber: Hasil reduksi penelitian (2023)

Berdasarkan hasil reduksi penelitian diatas, menunjukkan bahwa proses membangun kepercayaan antar stakeholder dalam hal ini pihak pemerintah daerah melakukan pertemuan dengan pihak yang terlibat dalam pengelolaan objek wisata alam Mendatte Park, akan tetapi sampai saat ini belum ada upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah untuk membahas keuntungan bersama yang dilakukan secara formal melalui perjanjian kerjasama dalam pengelolaan objek wisata alam Mendatte Park. Terkait komunikasi yang terjalin sampai saat ini masih didominasi oleh pihak pemerintah baik itu dari Dinas Pariwisata Kabupaten Enrekang maupun pemerintah Desa Mendatte. Ditemukan pula bahwa sampai saat ini belum ada upaya yang dilakukan oleh pihak pengelola objek wisata alam Mendatte Park dan pihak pemerintah untuk membangun kesepahaman dalam pengelolaan objek wisata alam Mendatte

Park secara bersama-sama karena pihak pengelola beranggapan masih bisa mengatasi masalah pengelolaan objek wisata sendiri dan juga pemerintah masih berfokus pada pencapaian kinerja organisasi.

Komunikasi yang terjalin antara pihak stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan objek wisata alam Mendatte Park dilakukan dalam posisi setara dan saling menghargai, dimana tujuan dari komunikasi tersebut berupaya agar stakeholder mendapat keuntungan dari adanya pengelolaan objek wisata alam Mendatte Park. Hal tersebut dapat pula dibuktikan oleh pihak pemerintah desa yang senantiasa berupaya membangun kepercayaan dengan pihak BUMDes Makinawa Mendatte untuk kemajuan objek wisata alam Mendatte Park kedepannya.

Proses membangun kepercayaan antar stakeholder yang terlibat didalam proses kolaborasi pengembangan dan pengelolaan objek wisata alam Mendatte Park, ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi, yakni proses komunikasi, komitmen antar stakeholder, visi bersama, dan dampak yang dihasilkan dari proses kerjasama. Faktor-faktor tersebut dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Proses komunikasi

Proses komunikasi yang dilakukan pada kerjasama ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, diantaranya: a) Bumdes Makinawa Mendatte; b) Pemerintah Desa Mendatte; c) Pemerintah daerah Kabupaten Enrekang (Dinas Pariwisata); dan d) Manajemen Villa Bambapuang. Proses komunikasi yang terbangun didalam kerjasama ini adalah komunikasi formal dan non formal, dimana komunikasi formal dilakukan pada pertemuan dan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Dinas Pariwisata), kemudian komunikasi non-formal dilakukan pada saat pertemuan-pertemuan insidental didalam aktifitas pengelolaan objek wisata serta senantiasa melakukan share information antar stakeholder. Walaupun proses komunikasi yang terbangun didalam kerjasama ini masih didominasi oleh pihak pemerintah, namun komunikasi didalam kerjasama ini pula terbangun atas rasa kesetaraan dan saling menghargai peran antar actor serta rasa saling memiliki satu sama lain terkait asset yang ada didalam objek wisata.

2. Komitmen antar stakeholder

Komitmen antar stakeholder didalam pengembangan pariwisata ini belum dilakukan secara efektif, dikarenakan belum adanya perjanjian kerjasama tertulis atau MoU

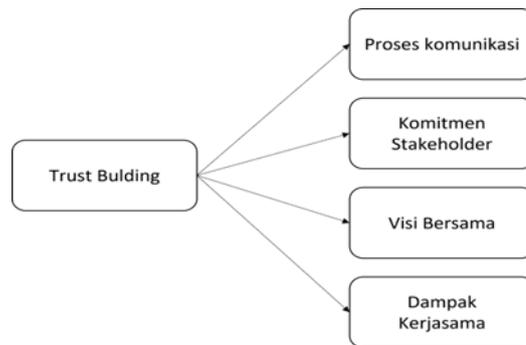
(Memorandum of Understanding) yang dilakukan antar actor khususnya pihak pemerintah (pemerintah desa dan kabupaten) dan pengelola objek wisata (Bumdes). Saat ini, komitmen yang terbangun didalam kerjasama ini berlaku secara normative, yakni dengan menjalankan peran masing-masing stakeholder dengan melakukan promosi dan memberikan bantuan. Contohnya, pemerintah desa berupaya untuk membangun dan menyediakan akses jalan yang baik ke lokasi objek wisata. Kemudian, actor lainnya seperti pihak manajemen Villa Bambapuang membantu didalam mempromosikan dan merekomendasikan objek wisata Mendatte kepada para konsumennya, begitupun sebaliknya jika ada pengunjung datang ke objek wisata, pengelola akan merekomendasikan dan mempromosikan agar dapat menginap di Villa Bambapuang. Jadi, komitmen ini terbangun atas kesepahaman bersama secara normative terkait peran yang dimiliki masing-masing stakeholder yang terlibat.

3. Visi bersama

Kepercayaan didalam kerjasama ini terbangun atas dasar kesamaan visi atau tujuan dari masing-masing stakeholders, dimana kesamaan tersebut menginginkan keuntungan dari adanya objek wisata Mendatte Park ini dan memiliki visi atau tujuan organisasi yang sama. Dimana pemerintah menginginkan pendapatan daerah dan untuk mewujudkan visi organisasi dari pengelolaan pariwisata tersebut. Sama halnya juga dengan pihak pengelola yang menginginkan keuntungan ataupun pendapatan serta pengelolaan yang baik dari objek wisata Mendatte Park ini.

4. Dampak yang dihasilkan

Dampak yang dihasilkan dari adanya kerjasama ini juga merupakan salah satu hal yang dapat membangun kepercayaan antar stakeholder, dimana dampak yang dihasilkan dari kerjasama ini berupa dampak ekonomi yang dapat menambah pendapatan masyarakat disekitar objek wisata melalui usaha-usaha ekonomi kreatif, menambah pendapatan pemerintah desa, meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan daerah, serta dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat disekita lokasi objek wisata. Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka proses membangun kepercayaan didalam pengembangan objek wisata alam Mendatte Park terbangun melalui beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi aktifitas didalam proses kolaborasi, diantaranya: a) Proses komunikasi; b) Komitmen Stakeholder; c) Visi Bersama; dan d) Dampak kerjasama. Proses kolaborasi ini dapat digambarkan kedalam grafik dibawah ini:



Gambar 1.

Faktor yang mempengaruhi Trust Building dalam Proses Kolaborasi Objek Wisata Alam Mendatte Park

Sumber: Diolah Penulis (2023)

PENUTUP

Membangun kepercayaan atau *trust building* merupakan salah satu tahapan pada proses kolaborasi, membangun kepercayaan ini sangat penting dilakukan didalam menjaga hubungan kolaborasi agar tetap berjalan secara efektif dalam pengembangan potensi pariwisata serta mengakomodir kepentingan-kepentingan yang ada. Sehingga pengelolaan suatu objek wisata yang dilakukan secara kolaboratif dapat bermanfaat pada aspek ekonomi dan sosial, yang dapat dirasakan oleh masyarakat setempat. Proses membangun kepercayaan antar stakeholder dalam dalam pengelolaan objek wisata alam Mendatte Park dilakukan dengan membangun komunikasi baik formal maupun informal yang yang mengedepankan hubungan yang setara serta saling menghargai antar stakeholder. Namun, saat ini belum ada upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah untuk membahas keuntungan bersama yang dilakukan secara formal melalui perjanjian kerjasama. Proses membangun kepercayaan antar stakeholder dalam pengembangan dan pengelolaan objek wisata alam Mendatte Park dipengaruhi oleh beberapa indikator, yakni proses komunikasi, komitmen antar stakeholder, visi bersama, dan dampak yang dihasilkan dari proses kerjasama.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, Z., & Astuti, R. S. (2019). [Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kepariwisata yang Berkelanjutan \(Studi Pada Kegiatan Pesta Rakyat Simpedes Tahun 2019 Di Kabupaten Pati\)](#). In *Conference on Public Administration and Society*, 1(1), 92–117. <https://proceedings.undip.ac.id/index.php/copas/article/view/22>
- Afandi, M. N., Tri Anomsari, E., Novira, A., & Sudartini, S. (2023). [Collaborative governance in a mandated setting: shifting collaboration in stunting interventions at local level](#). *Development Studies Research*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/21665095.2023.2212868>
- Akbar, R., Supriyono, B., & Domai, T. (2022). [Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Gubugklakah Kabupaten Malang](#). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 8(2), 170–177. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2022.008.02.5>
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). [Collaborative governance in theory and practice](#). *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032> (2)
- Djabbari, M. H. (2023). [Public Private Partnership Dalam Pengembangan Pariwisata](#). Lakeisha.
- Djabbari, M. H., Alwi, A., & Tamrin, S. H. (2021). [Implementasi Public Private Partnership dalam Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Toraja Utara](#). *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 7(1), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.31947/jakpp.v7i1.13203>
- Emerson, K. (2018). [Collaborative governance of public health in low- and middle-income countries: Lessons from research in public administration](#). *BMJ Global Health*, 3, 1–9. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2017-000381>
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). [Collaborative Governance Regimes](#). Georgetown University Press. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=cE5gCwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Collaborative++Governance+Regime&ots=P3m8pDbNCS&sig=rV2ZO158XvJ2rpyFhcLBJzqNSwg&redir_esc=y#v=onepage&q=Collaborative Governance Regime&f=false
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). [An integrative framework for collaborative](#)

[governance](#). *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.

<https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>

Sudarmo. (2011). *Isu-Isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance*. SmartMedia.

Sufianti, E., Sawitri, D., Pribadi, K. N., & Firman, T. (2013). [Proses Kolaboratif dalam Perencanaan Berbasis Komunikasi Pada Masyarakat Non-Kolaboratif](#). *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 29(2), 133.
<https://doi.org/10.29313/mimbar.v29i2.390>